Jurnal Asimilasi Pendidikan
http://asimilasi.journalilmiah.org.
Doi : https://doi.org/10.61924/jasmin. 4i3.138

Vol 4. No 3 Tahun 2026
E-ISSN : 3021-7083
Page. 365-378

Peran PKBM dalam Meningkatkan Akses dan Keberlanjutan Pendidikan Kesetaraan Paket C (Studi Kasus Pada PKBM MUMTAZ)

Abdul Hayyi[1*], Padlurrahman[1], Mohzana[1], Badarudin[1]
[1]Universitas Hamzanwadi, Indonesia
*Corresponding author email: hayyi.yii.@gmail.com

History Article

Article history:

Submission 25-06-2026
Received 30-06-2026
Approved 25-07-2026
Published 29-07- 2026

Keywords:

Package C Equivalency Education, Educational Access, Educational Sustainability.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of PKBM Mumtaz in improving access to and sustainability of the Package C Equivalency Education Program for the community of Labuhan Haji Village, Labuhan Haji District, East Lombok Regency. The research focuses on: (1) the role of PKBM Mumtaz in improving access to Package C equivalency education; (2) the strategies and mechanisms employed in implementing the Package C program. This research employed a qualitative approach using a single-case study design. The research participants consisted of PKBM administrators, tutors, learners, community members, and local government representatives involved in the implementation of the Package C program. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data validity was ensured through source triangulation, technique triangulation, and time triangulation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The study concludes that PKBM Mumtaz plays a strategic role in expanding access to and ensuring the sustainability of Package C equivalency education through the provision of flexible, adaptive, and community-based educational services. The success of the program is supported by collaboration among administrators, tutors, learners, community members, and government institutions in promoting equitable educational opportunities for individuals who have limited access to formal education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PKBM Mumtaz dalam meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan kesetaraan Paket C bagi masyarakat Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Fokus penelitian meliputi: (1) peran PKBM Mumtaz dalam meningkatkan akses pendidikan kesetaraan Paket C; (2) strategi dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal *(single case study)*. Subjek penelitian terdiri atas pengelola PKBM, tutor, warga belajar, masyarakat, dan pemerintah daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PKBM Mumtaz berperan strategis dalam memperluas akses dan menjaga keberlanjutan pendidikan kesetaraan Paket C melalui penyelenggaraan layanan pendidikan yang fleksibel, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Keberhasilan program didukung oleh sinergi antara pengelola, tutor, warga belajar, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi masyarakat yang belum memperoleh layanan pendidikan formal secara optimal.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Secara konstitusional, komitmen negara terhadap pendidikan tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Lebih lanjut, ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan konstitusional ini menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab negara sekaligus hak yang harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Namun demikian, dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Tantangan tersebut meliputi ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, kesenjangan kualitas layanan pendidikan, serta rendahnya tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan menengah atas di sejumlah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi dan kebijakan pendidikan telah tersedia, implementasinya di tingkat lokal belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh warga negara secara merata.

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam pembangunan nasional yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembentukan karakter bangsa, serta penguatan daya saing negara di tingkat global. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang menentukan arah kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk menjamin pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan sistem pendidikan itu sendiri.

Akses pendidikan di Indonesia masih menjadi isu krusial dalam pembangunan sektor pendidikan. Akses pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan lembaga pendidikan secara fisik, tetapi juga mencakup keterjangkauan biaya, kemudahan transportasi, kesiapan peserta didik, serta dukungan lingkungan sosial dan ekonomi. Menurut UNESCO (2017), akses pendidikan yang inklusif harus memperhatikan berbagai faktor penghambat yang bersifat multidimensional, termasuk kemiskinan, lokasi geografis, gender, dan latar belakang sosial budaya.

Data nasional menunjukkan bahwa meskipun angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar relatif tinggi, namun APK pada jenjang pendidikan menengah atas masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Banyak peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau sederajat karena faktor ekonomi, kebutuhan untuk bekerja, pernikahan usia dini, serta rendahnya motivasi belajar akibat pengalaman negatif di sekolah formal.

World Bank (2018) menekankan bahwa negara-negara berkembang menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan atas, terutama bagi kelompok masyarakat miskin, penduduk pedesaan, dan pekerja usia muda. Dalam banyak kasus, pendidikan formal tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan mekanisme pendidikan alternatif yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Pendidikan nonformal, termasuk pendidikan kesetaraan, dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Dalam konteks ini, pendidikan kesetaraan Paket C hadir sebagai alternatif strategis bagi masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan menengah atas melalui jalur formal. Paket C memberikan kesempatan bagi warga belajar untuk memperoleh ijazah setara SMA tanpa harus mengikuti sistem pendidikan formal yang kaku dan sering kali tidak sesuai dengan kondisi kehidupan mereka. Fleksibilitas waktu, metode pembelajaran yang kontekstual, serta pendekatan berbasis kebutuhan peserta didik menjadikan Paket C lebih adaptif terhadap realitas sosial masyarakat.

Konsep pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) menjadi paradigma penting dalam pembangunan pendidikan modern. Pendidikan tidak lagi dipahami sebagai aktivitas yang terbatas pada usia sekolah, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang berlangsung sepanjang kehidupan individu. Dalam kerangka ini, pendidikan nonformal memiliki peran sentral sebagai wahana pembelajaran bagi orang dewasa dan remaja yang telah melewati usia sekolah formal.

Menurut Coombs & Ahmed (1974), pendidikan nonformal merupakan segala bentuk kegiatan pendidikan yang terorganisasi di luar sistem formal dan bertujuan untuk melayani kebutuhan belajar kelompok tertentu dalam masyarakat. Pendidikan nonformal memungkinkan individu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, pendidikan nonformal berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Di Indonesia, implementasi pendidikan sepanjang hayat diwujudkan melalui berbagai program pendidikan nonformal, termasuk pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan, serta pendidikan keaksaraan. PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal berbasis masyarakat menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan program-program tersebut. Keberadaan PKBM memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan yang fleksibel, murah, dan relevan dengan kebutuhan lokal. Pendidikan kesetaraan merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Program Paket A, B, dan C dirancang untuk memberikan kesempatan kedua *(second chance education)* bagi warga yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Paket C secara khusus diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan menengah atas serta memperluas peluang kerja dan mobilitas sosial lulusan.

Menurut Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (2015), pendidikan kesetaraan Paket C bertujuan meningkatkan mutu dan daya saing warga belajar melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup sehingga lulusan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja dan berwirausaha. Lebih lanjut Nurhanipah & Arin Khairunnisa (2023) menyebutkan bahwa pendidikan kesetaraan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kompetensi akademik yang setara dengan pendidikan formal, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kecakapan hidup dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan sosial maupun ekonomi. Melalui program yang diselenggarakan oleh PKBM, warga belajar dibekali keterampilan fungsional dan sikap mandiri yang dapat menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan, berwirausaha, ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan tidak hanya berorientasi pada pencapaian ijazah, tetapi juga pada pengembangan kapasitas individu secara holistik.

Namun demikian, efektivitas pendidikan kesetaraan sangat bergantung pada peran dan kapasitas lembaga penyelenggara, termasuk PKBM. Faktor-faktor seperti kualitas tutor, ketersediaan sarana prasarana, dukungan masyarakat, serta manajemen kelembagaan menjadi determinan utama keberhasilan program. Oleh karena itu, kajian tentang peran PKBM dalam meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan kesetaraan menjadi penting untuk memahami sejauh mana pendidikan nonformal mampu menjawab tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Konteks pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari kondisi lokal di mana pendidikan tersebut diselenggarakan. Kebijakan pendidikan yang bersifat nasional perlu diimplementasikan secara adaptif sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini, PKBM sebagai lembaga berbasis masyarakat memiliki keunggulan karena dekat dengan warga belajar dan memahami kebutuhan lokal secara langsung. Di daerah seperti Kabupaten Lombok Timur, di mana masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan menengah atas, pendidikan kesetaraan melalui PKBM menjadi sangat relevan. PKBM tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap konteks pendidikan di Indonesia menjadi landasan penting dalam mengkaji peran PKBM Mumtaz Desa Labuhan Haji. Konteks ini memberikan kerangka analitis untuk menilai bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dalam praktik lokal serta bagaimana pendidikan nonformal berkontribusi terhadap peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan kesetaraan Paket C.

Beragam studi telah mengangkat peran PKBM dalam konteks pendidikan nonformal di Indonesia. Misalnya, penelitian di wilayah Cianjur menunjukkan bahwa PKBM berkontribusi dalam mengurangi angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan keterampilan peserta didik melalui program nonformalnya (Ramdhan, 2025). Studi lain di Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa pelaksanaan Paket C di PKBM efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta didik, meskipun masih dihadapkan dengan keterbatasan fasilitas dan teknologi pembelajaran (Taufik et al., 2025). Kajian terhadap pemberdayaan masyarakat melalui Paket C di PKBM Kedondong menyimpulkan bahwa pendidikan kesetaraan juga berperan dalam proses transformasi pengetahuan masyarakat serta mendorong keterlibatan warga dalam kegiatan kewirausahaan dan sosial (Rohmah et al., 2024). Temuan-temuan ini memberikan konteks penting untuk memahami bagaimana PKBM bukan hanya menjadi jalur alternatif pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kabupaten Lombok Timur, yang termasuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki karakter geografis dan sosial yang khas dengan banyak daerah pedesaan yang memiliki tantangan akses pendidikan, seperti infrastruktur yang belum merata, keterbatasan jaringan internet, dan mobilitas warga yang rendah. Di daerah seperti Desa Labuhan Haji, kegitan pendidikan nonformal menjadi sangat penting sebagai alat untuk meningkatkan inklusivitas pendidikan bagi warga yang sebelumnya tidak mampu menyelesaikan jenjang SMA secara formal.

Berdasarkan hasil observasi awal diperoleh gambaran kondisi pendidikan masyarakat yang menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan pada jenjang menengah atas. Dari data BPS Kabupaten Lombok Timur (2025) jumlah penduduk Kecamatan Labuhan Haji tercatat sebanyak ± 69.587 jiwa, dengan jumlah penduduk usia 16 tahun ke atas sekitar 5.762 jiwa yang merupakan kelompok usia potensial untuk mengikuti pendidikan menengah

atas atau pendidikan kesetaraan. Namun demikian, data menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat. Berdasarkan verval data ATS (Anak Tidak Sekolah) terdapat sekitar 491 orang (usia 16 s.d 20) yang mengalami putus sekolah pada jenjang SMA.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan formal, baik karena faktor ekonomi, pekerjaan, maupun kondisi sosial lainnya. Dalam konteks ini, keberadaan pendidikan kesetaraan melalui PKBM menjadi alternatif penting untuk memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal. Berdasarkan data DAPODIK PKBM Mumtaz tahun 2025, jumlah peserta didik yang mengikuti program pendidikan kesetaraan Paket C tercatat sebanyak 233 orang yang berasal dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Lombok Timur dan 85 orang yang berasal dari Desa Labuhan Haji maupun wilayah sekitarnya di Kecamatan Labuhan Haji. Data ini menunjukkan bahwa PKBM Mumtaz memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pendidikan alternatif bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan menengah atas. Salah satu lembaga nonformal yang berperan nyata dalam konteks ini adalah PKBM MUMTAZ yang terletak di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji. Institusi ini telah berdiri sejak tahun 2013 dan memiliki akreditasi A, menjadi salah satu pilihan utama warga untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C.

Berdasarkan data DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) dan observasi awal, PKBM Mumtaz memiliki latar belakang institusional yang kuat dengan akreditasi A dan status operasional yang valid.PKBM ini menawarkan layanan Paket C setara SMA di wilayah Desa Labuhan Haji dan sekitarnya. Lembaga ini telah berjalan secara konsisten sejak awal pendiriannya, dan telah menjadi rujukan banyak warga untuk menyelesaikan pendidikan kesetaraan mereka. Kepala lembaga menjelaskan bahwa pola pembelajaran yang digunakan bersifat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan warga setempat termasuk kelas tatap muka dan pendekatan yang relevan dengan kondisi local, hal ini sesuai dengan jumlah lulusan lebih dari 2000 orang sejak Lembaga ini didirikan. Namun, seiring dengan peluang yang ada, PKBM Mumtaz menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses internet di lingkungan belajar, rasio guru-siswa yang masih perlu diperbaiki, dan sedikitnya fasilitas pembelajaran modern. Faktor-faktor ini berpotensi mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C. Akses pendidikan merupakan konsep multidimensional yang mencakup ketersediaan fisik lembaga pendidikan, keterjangkauan biaya, penerimaan masyarakat, serta kesiapan peserta didik untuk belajar. Di banyak daerah pedesaan di Indonesia, termasuk Lombok Timur, hambatan akses seringkali bersifat struktural, seperti jarak yang jauh ke pusat pendidikan formal, keterbatasan transportasi, rendahnya pendapatan keluarga, serta kurangnya informasi tentang pilihan pendidikan alternatif seperti Paket C.

Dalam perspektif human capital theory, pendidikan dipandang sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi nasional (Becker, 1993). Namun, investasi pendidikan tidak akan optimal apabila akses dan keberlanjutan pendidikan hanya terfokus pada jalur formal. Oleh karena itu, penguatan pendidikan nonformal menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, khususnya di negara dengan karakteristik sosial dan geografis yang kompleks seperti Indonesia.

Selain akses, keberlanjutan pendidikan kesetaraan merupakan tantangan strategis. Keberlanjutan tidak hanya berarti keberlangsungan operasional lembaga, tetapi juga mencakup keberlanjutan proses pembelajaran, keberpihakan masyarakat terhadap program, dukungan sumber daya (termasuk materi dan tenaga pengajar), serta dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualifikasi warga. Dalam konteks PKBM Mumtaz, peran lembaga ini tidak hanya sebagai penyelenggara Paket C, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat Desa Labuhan Haji dan sekitarnya. Oleh karena itu, mengkaji peran PKBM Mumtaz dalam meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan kesetaraan Paket C menjadi penting untuk memahami bagaimana pendidikan nonformal berkontribusi terhadap pemerataan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di tingkat lokal.

Pemilihan PKBM Mumtaz sebagai studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan akademik dan empiris. PKBM Mumtaz yang berlokasi di Desa Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, merupakan lembaga pendidikan nonformal yang telah beroperasi sejak tahun 2013 dan memiliki akreditasi A, sehingga secara kelembagaan dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket C. Selain itu, PKBM Mumtaz menunjukkan konsistensi dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat pedesaan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal, serta tetap bertahan di tengah berbagai keterbatasan sarana, pendanaan, dan kondisi sosial ekonomi warga belajar. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat kajian ilmiah yang secara khusus dan komprehensif menganalisis peran PKBM Mumtaz dalam meningkatkan akses dan menjaga keberlanjutan pendidikan kesetaraan Paket C. Oleh karena itu, PKBM Mumtaz dipandang representatif dan relevan untuk dikaji secara mendalam sebagai studi kasus guna memperoleh pemahaman kontekstual mengenai praktik penyelenggaraan pendidikan nonformal yang berkelanjutan di wilayah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, persepsi, serta praktik sosial dari sudut pandang subjek penelitian secara holistik dan kontekstual (Creswell, 2009; Denzin & Lincoln, 2005). Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu unit analisis yang terikat (bounded system). Prosedur penelitian ini mengikuti tahapan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2009) dan Yin (2018), yang menekankan eksplorasi mendalam terhadap satu unit analisis dalam konteks kehidupan nyata dengan beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap validasi data, dan tahap penyususnan laporan.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Lincoln dan Guba (1985), keabsahan penelitian kualitatif dapat dilihat melalui empat kriteria utama, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.untuk menjamin keabsahan data penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi data, member check, audit trial, ketekunan pengamatan, kecakupan refrensi dan deskripsi mendalam. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan

Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran PKBM Mumtaz dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Kesetaraan Paket C bagi Masyarakat Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa PKBM Mumtaz memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan kesetaraan Paket C bagi masyarakat Desa Labuhan Haji dan wilayah sekitarnya. Peran tersebut tampak melalui penyediaan layanan pendidikan yang terbuka, fleksibel, mudah diakses, serta mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan formal. Hasil temuan menunjukkan bahwa PKBM tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan nonformal, tetapi juga sebagai fasilitator sosial yang aktif menjembatani kebutuhan pendidikan masyarakat. Temuan ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang menunjukkan berbagai strategi yang dilakukan lembaga dalam memperluas akses pendidikan. Hasil wawancara dengan pengelola PKBM menunjukkan bahwa PKBM Mumtaz berperan aktif sebagai penyedia layanan pendidikan alternatif bagi masyarakat yang tidak terlayani sekolah formal, sebagaimana disampaikan oleh ketua PKBM berperan aktif sebagai penyedia layanan pendidikan alternatif bagi masyarakat yang tidak terlayani di sekolah formal. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh informan lainnya yang berasal dari unsur guru/tutor dan Pemerintah: PKBM sangat membantu masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau. PKBM cukup efektif dalam meningkatkan akses pendidikan Masyarakat.

Sasaran utama program Paket C adalah anak putus sekolah, pekerja muda, dan masyarakat usia dewasa. Dalam menjangkau sasaran tersebut, PKBM melakukan berbagai upaya, seperti pendataan langsung ke masyarakat, pendekatan sosial, serta menjalin komunikasi dengan lingkungan sekitar, sebagaimana disampaikan oleh ketua PKBM "PKBM melakukan pendataan langsung dan pendekatan ke masyarakat. Upaya Upaya ini dilakukan PKBM dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemilik kebijakan perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Informal Kabupaten Lombok Timur “Pemerintah dan PKBM bekerja sama menjangkau warga putus sekolah.

Selain melakukan pendataan, PKBM juga aktif melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media. Sosialisasi dilakukan secara langsung melalui kegiatan desa maupun secara tidak langsung melalui media sosial, tokoh masyarakat, kepala dusun, dan alumni. Sesuai dengan hasil wawancara, pengelola menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan di setiap pertemuan desa dan kunjungan langsung ke Masyarakat. "Sosialisasi dilakukan secara rutin melalui pertemuan desa dan kunjungan langsung. Ketua Badan Permusywaratan Desa (BPD) Desa Labuhan Haji menjelaskan:

“PKBM cukup membantu masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, sehingga Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka lebih baik, banyak warga kami yang telah tamat paket C di PKBM Mumtaz mendapatkan pekerjaan di perusahaan perusahaan untuk bekerja. Namun masih banyak warga yang belum tau tentang Paket C, oleh karena di

setiap pertemuan desa kami sering mengundang pengelola PKBM untuk sosialisasi programnya.

Temuan tersebut diperkuat melalui hasil observasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berlangsung secara aktif melalui kegiatan di desa, kecamatan, media sosial (WhatsApp dan Facebook), serta pemasangan banner informasi pendaftaran. Hal ini menunjukkan bahwa PKBM menggunakan pendekatan yang cukup luas dan adaptif dalam menyebarluaskan informasi pendidikan kepada masyarakat.

Selain aspek sosialisasi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fleksibilitas layanan menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas akses pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, pengelola menyatakan bahwa jadwal pembelajaran disesuaikan dengan kondisi warga belajar yang sebagian besar telah bekerja. "Jadwal dibuat fleksibel, yaitu sore atau malam. Begitu juga dari pernyataan warga belajar bahwa jadwal pembelajaran cukup sesuai dengan aktivitasnya: “Jadwal lumayan sesuai dengan kegiatan saya.

Tutor juga menjelaskan bahwa mayoritas warga belajar berasal dari kelompok putus sekolah dan pekerja, sehingga fleksibilitas pembelajaran menjadi alasan penting masyarakat kembali mengikuti pendidikan. "PKBM menarik minat masyarakat melalui fleksibilitas pembelajaran. Sebagian peserta didik merupakan pekerja sehingga waktu belajar yang fleksibel menjadi kebutuhan utama. Sistem pembelajaran seperti ini menunjukkan bahwa PKBM telah menerapkan prinsip pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat. Pendidikan tidak lagi diposisikan secara kaku seperti pendidikan formal, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik.

Hasil observasi memperkuat temuan tersebut, peneliti menemukan bahwa jadwal pembelajaran memang dirancang sesuai kondisi warga belajar karena sebagian besar peserta telah bekerja. Sistem pembelajaran juga memanfaatkan model luring dan daring sehingga memberi kesempatan lebih luas bagi warga belajar untuk tetap mengikuti proses Pendidikan. Temuan lain menunjukkan bahwa kemudahan akses juga terlihat dari sistem biaya dan pendaftaran. Pengelola menjelaskan bahwa biaya pendidikan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi warga belajar. Bahkan bagi peserta usia tertentu tersedia pembiayaan melalui program pemerintah. "Ada kebijakan keringanan biaya bagi warga kurang mampu, bahkan usia 16–25 tahun gratis karena dibiayai melalui BOP Kesetaraan. Warga belajar juga menyebutkan bahwa biaya Pendidikan masih bisa dinegosiasi, pihak pengelola memberikan relaksasi pembiayaan. “Biaya masih terjangkau bahkan gratis. Purwadi (salah satu informan dari unsur pemerintah juga menyebutkan “Dukungan pendanaan tersedia meskipun masih terbatas. Pembiayaan adalah faktor penting dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat, dan dirancang terjangkau dan fleksibel agar tidak menjadi hambatan bagi Masyarakat.

Temuan observasi menunjukkan bahwa biaya pendidikan menyesuaikan kemampuan peserta didik dan memperoleh dukungan pembiayaan melalui dana pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa PKBM berupaya mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab rendahnya akses pendidikan. Bagi warga belajar, keberadaan PKBM dipandang sebagai kesempatan kedua untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti. Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa alasan mengikuti Paket C karena ingin memperoleh ijazah dan memperbaiki masa depan. "Saya ikut Paket C karena ingin melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti. Warga belajar juga menyatakan bahwa proses pendaftaran mudah, lokasi cukup dekat, serta biaya masih terjangkau. Hal tersebut

memperlihatkan bahwa hambatan akses seperti biaya, lokasi, dan prosedur administrasi telah diminimalkan oleh PKBM.

Dari perspektif masyarakat, keberadaan PKBM dinilai cukup membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan. Namun, masyarakat juga menilai bahwa sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar menjangkau lebih luas. "Sudah membantu, tapi belum menjangkau semua Masyarakat. Informasi cukup tersedia, tapi belum merata. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun peran PKBM dinilai positif, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memperoleh informasi secara merata.

Pandangan pemerintah juga menunjukkan bahwa PKBM memiliki kontribusi strategis dalam pendidikan nonformal. "PKBM cukup efektif dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat. Pemerintah juga menyebutkan bahwa indikator keberhasilan PKBM terlihat dari meningkatnya partisipasi warga belajar dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil triangulasi wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa peran PKBM Mumtaz dalam meningkatkan akses pendidikan Paket C diwujudkan melalui: (1) penyediaan layanan pendidikan yang terbuka dan fleksibel; (2) pelaksanaan sosialisasi secara aktif; (3) pemberian kemudahan biaya dan pendaftaran; (4) penyesuaian jadwal pembelajaran dengan kondisi warga; dan (5) kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan layanan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons positif terhadap keberadaan PKBM dan belum ditemukan keluhan berarti terhadap layanan yang diberikan.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa PKBM Mumtaz telah menjalankan perannya dengan baik dalam meningkatkan akses pendidikan kesetaraan Paket C. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh fleksibilitas sistem, pendekatan sosial yang intensif, serta kemampuan lembaga menyesuaikan layanan dengan kondisi masyarakat lokal. Temuan ini sejalan dengan teori Coombs dan Ahmed yang menyatakan bahwa pendidikan nonformal memiliki karakter fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta pendapat Sudjana yang menegaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, dan penambah pendidikan formal. Dengan demikian, keberadaan PKBM Mumtaz menunjukkan bahwa pendidikan nonformal mampu menjadi alternatif efektif dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di tingkat lokal. PKBM tidak sekadar sebagai penyelenggara pendidikan nonformal, melainkan sebagai institusi pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan belajar dan pembangunan sumber daya manusia.

2. Strategi dan Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C yang Diterapkan oleh PKBM Mumtaz dalam Menyesuaikan Layanan Pendidikan dengan Kondisi dan Kebutuhan Warga Belajar

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Mumtaz dilaksanakan melalui strategi yang dirancang untuk menyesuaikan layanan pendidikan dengan kondisi dan kebutuhan warga belajar serta mekanisme pelaksanaan yang mendukung penerapan strategi tersebut. Strategi yang diterapkan meliputi perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat, fleksibilitas layanan pembelajaran, penerapan pendekatan. andragogi, pembelajaran kontekstual, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan. Adapun mekanisme penyelenggaraan diwujudkan melalui proses perencanaan program, pengaturan jadwal

pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, penggunaan media pembelajaran, sistem evaluasi hasil belajar, dan monitoring program secara rutin.

Strategi pertama yang diterapkan PKBM Mumtaz adalah perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat. Hasil wawancara dengan Ketua PKBM menunjukkan bahwa penyusunan program tidak hanya mengacu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik warga belajar. "Perencanaan program dilakukan secara sistematis berdasarkan kebutuhan masyarakat." (Wr. Aminulloh, Sabtu, 02-05-2026). Program dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga layanan pendidikan yang diberikan lebih relevan dengan kondisi lokal. "Penyusunan program disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan warga belajar yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah." (Wr. Aminulloh, Sabtu, 02-05-2026). Strategi ini menunjukkan bahwa PKBM Mumtaz menerapkan pendekatan need assessment dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaannya dilakukan melalui identifikasi kebutuhan masyarakat, pengumpulan informasi mengenai karakteristik calon warga belajar, serta penyusunan program yang disesuaikan dengan hasil identifikasi tersebut. Temuan observasi menunjukkan bahwa program yang diselenggarakan memang menyesuaikan kondisi peserta didik yang sebagian besar merupakan masyarakat usia dewasa dan telah bekerja.

Strategi berikutnya adalah fleksibilitas layanan pembelajaran. Hasil wawancara Pengelola PKBM, Guru, dan Warga Belajar menunjukkan bahwa PKBM memberikan keleluasaan dalam pengaturan waktu belajar agar warga belajar tetap dapat mengikuti pendidikan tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. "Pembelajaran disesuaikan dengan kesempatan waktu terutama bagi warga belajar yang sudah bekerja. Strategi ini menjadi penting mengingat sebagian besar peserta didik merupakan pekerja. Jadwal cukup sesuai, walau kadang bentrok dengan pekerjaan

Mekanisme pelaksanaannya terlihat melalui penjadwalan pembelajaran yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu warga belajar, penggunaan pembelajaran luring dan daring, serta pemberian kesempatan bagi peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar sesuai kondisi masing-masing. Hasil observasi memperlihatkan bahwa beberapa warga belajar hadir setelah selesai bekerja dan tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik karena jadwal yang diterapkan bersifat fleksibel.

Salnjutnya, strategi lain yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran paket C adalah penggunaan pendekatan andragogi. Pengelola dan tutor menyatakan bahwa pembelajaran dirancang sesuai karakteristik warga belajar yang mayoritas berusia dewasa. “Pendekatan yang digunakan berbasis andragogi”. (Wr. Aminulloh, Sabtu, 02-05-2026). "Pendekatan yang digunakan sesuai dengan karakter warga belajar orang dewasa." (Wr. Junaidi, Rabu, 13-05-2026). Strategi ini bertujuan agar proses belajar lebih sesuai dengan kebutuhan, pengalaman, dan kemampuan peserta didik. Mekanisme penerapannya dilakukan melalui penggunaan metode diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, dan pertukaran pengalaman selama pembelajaran berlangsung. Hasil observasi menunjukkan bahwa warga belajar lebih aktif ketika tutor menggunakan metode diskusi dibandingkan metode ceramah, sehingga suasana belajar menjadi lebih partisipatif dan komunikatif.

Selain pendekatan andragogi, PKBM Mumtaz juga menerapkan strategi pembelajaran kontekstual. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan guru: “Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta”. "Pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari

warga." (Wr. Junaidi, Rabu, 13-05-2026). Juga Ketua PKBM Menyebutkan: "Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari warga." (Wr. Aminulloh, Sabtu, 02-05-2026).

Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga dikaitkan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Strategi ini bertujuan agar materi yang dipelajari memiliki manfaat langsung bagi warga belajar. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman hidup peserta didik, penggunaan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat, serta pembahasan materi yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Temuan observasi menunjukkan bahwa tutor sering menghubungkan materi pembelajaran dengan penggunaan teknologi dan pengalaman kerja warga belajar sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Strategi pemanfaatan teknologi sebagai medeia pembelajaran juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan program. PKBM berupaya menyesuaikan layanan pendidikan dengan perkembangan teknologi melalui penggunaan perangkat elektronik dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Pengelola dan Guru PKBM Mumtaz: “Media pembelajaran digunakan untuk mendukung proses belajar media elektronik (Android dan Komputer)”, (Wr. Junaidi, Rabu, 13-05-2026). “Media elektronik (HP, Komputer, dll) Media pembelajaran digunakan secara optimal”. (Wr. Aminulloh, Sabtu, 02-05-2026). Mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan telepon genggam, komputer, media komunikasi daring, serta layar LED interaktif yang diperoleh melalui bantuan pemerintah. Hasil observasi menunjukkan bahwa media tersebut digunakan untuk mendukung pembelajaran baik secara luring maupun daring, meskipun penggunaannya masih perlu terus ditingkatkan.

Strategi terakhir yang ditemukan adalah pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan warga belajar sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan program. Sekretaris Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur menyatakan: “monitoring, evaluasi serta pembinaan dilakukan oleh Pemerintah dilakukan secara rutin”. (Wr. Purwadi, Senin, 04-05-2026). Juga pengeloa PKBM menyebutkan: "Monitoring dilakukan secara rutin oleh pengelola." (Wr. AMinulloh, Sabtu, 02-05-2026). Mekanisme evaluasinya dilakukan melalui pemberian tugas, diskusi, ujian tengah semester, ujian semester, ujian akhir pendidikan kesetaraan, serta keikutsertaan warga belajar dalam Tes Kompetensi Akademik (TKA). Selain itu, monitoring program dilaksanakan secara rutin oleh pengelola PKBM bersama penilik pendidikan nonformal untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai perencanaan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem evaluasi dan monitoring telah berjalan secara teratur dan menjadi bagian penting dalam pengelolaan program Paket C.

Berdasarkan triangulasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa strategi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Mumtaz meliputi perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, fleksibilitas layanan pembelajaran, penerapan pendekatan andragogi, pembelajaran kontekstual, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Sementara itu, mekanisme penyelenggaraannya diwujudkan melalui proses identifikasi kebutuhan warga belajar, pengaturan jadwal yang fleksibel, pelaksanaan pembelajaran luring dan daring, penggunaan metode diskusi dan pembelajaran berbasis pengalaman, pemanfaatan media pembelajaran, pelaksanaan evaluasi berkala, dan monitoring program secara rutin. Temuan ini menunjukkan bahwa PKBM Mumtaz tidak hanya memiliki strategi yang sesuai dengan

karakteristik pendidikan nonformal, tetapi juga didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang memungkinkan strategi tersebut berjalan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan warga belajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut adalah simpulan penelitian yang disusun sesuai dengan masing-masing rumusan masalah:Peran PKBM Mumtaz dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Kesetaraan Paket C bagi Masyarakat Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. PKBM Mumtaz memiliki peran yang penting dalam meningkatkan akses pendidikan kesetaraan Paket C bagi masyarakat Desa Labuhan Haji dan sekitarnya. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan pendidikan alternatif yang terbuka, fleksibel, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat mengakses atau menyelesaikan pendidikan formal. Upaya peningkatan akses dilakukan melalui pendataan calon warga belajar, sosialisasi program secara langsung maupun melalui media sosial, kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa, penerapan jadwal pembelajaran yang fleksibel, serta pemberian kemudahan biaya pendidikan. Keberadaan PKBM Mumtaz memberikan kesempatan kedua (second chance education) bagi masyarakat yang putus sekolah untuk memperoleh pendidikan setara SMA. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa jangkauan sosialisasi yang belum merata sehingga informasi mengenai program Paket C belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Strategi dan Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C yang Diterapkan oleh PKBM Mumtaz dalam Menyesuaikan Layanan Pendidikan dengan Kondisi dan Kebutuhan Warga Belajar

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Mumtaz dilaksanakan melalui strategi yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik warga belajar. Strategi tersebut meliputi perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat (need assessment), fleksibilitas layanan pembelajaran, penerapan pendekatan andragogi, pembelajaran kontekstual, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan. Strategi tersebut diimplementasikan melalui mekanisme identifikasi kebutuhan warga belajar, penyusunan jadwal yang fleksibel, pelaksanaan pembelajaran luring dan daring, penggunaan metode diskusi dan berbasis pengalaman, pemanfaatan media pembelajaran elektronik, serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara rutin. Strategi dan mekanisme yang diterapkan terbukti mampu menyesuaikan layanan pendidikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan warga belajar sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, partisipatif, dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2022). *Statistik Indonesia = Statistical yearbook of Indonesia*. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/publication/2022/02/25

BPS Kabupaten Lombok Timur. (2025). *Kecamatan Labuhan Haji dalam Angka*.

Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1974). *ATTACKING RURAL POVERTY How Nonformal Education Can Help*. THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY PRES.

Creswell, J. W. (2009). Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In *Intercultural Education* (Vol. 3, Number 2). https://doi.org/10.1080/14675980902922143

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *SAGE Publications*.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. (2015). *Pengembangan Program Evaluasi Penyelenggaraan Paket C Vokasi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. (2020). *Model Pembelajaran Keterampilan Pilihan Komputer Aplikasi Perkantoran pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Firmansyah, F., & Ahyani, H. (2023). *Teknologi Pendidikan Jarak Jauh* (1st ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.

Kamil, Mustofa. (2011). *Pendidikan Nonformal : Pengembangan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia : Sebuah Pembelajaran dari Kominkan di Jepang* (2nd ed.). Alfabeta.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2016). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Number 1). Sage Publications, Inc..

Munir. (2012). *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.

Nurhanipah, & Arin Khairunnisa. (2023). Peran Pendidikan Kesetaraan dalam Lingkungan Masyarakat. *Nusantara Hasana Journal*, *3*(2). https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.930

Ramdhan, M. (2025). PKBM'S Contribution to Improving the Quality of Non-Formal Education in Cianjur. *Jurnal ASIK: Jurnal Administrasi, Bisnis, Ilmu Manajemen & Kependidikan*, *3*(2). https://doi.org/10.59639/asik.v3i2.99

Rohmah, S. S., Ridwan, & Wahyuni, S. (2024). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket C pada PKBM Kedondong . *Realisasi : Ilmu Pendidikan, Seni Rupa Dan Desain* , *1*. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/realisasi.v1i4.366

Sagala, S. (2009). Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan: Pemberdayaan guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam manajemen sekolah. In *The Concept and Meaning*. In Bandung : CV Alfabeta.

Sihombing, Umberto. (2000). *Pendidikan Luar Sekolah : Manajemen Strategi : Konsep, Kiat, dan Pelaksanaan*. PD. Mahkota.

Taufik, A., Nursalam, N., & Akib, E. (2025). Evaluation of the Effectiveness of the PKBM (Community Learning Activity Center) Program in Package C Equivalent to High School in Improving Student Competence in Wajo Regency. *PPSDP International Journal of Education*, *4*(2). https://doi.org/10.59175/pijed.v4i2.840

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (n.d.).

UNESCO. (2015). Rethinking Education: towards a Global Common Good? In *Rethinking education: towards a global common good?* UNESCO Publishing. https://doi.org/10.54675/mdzl5552

UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals Learning Objectives (Note: Imp lementierung der BNE). In *Unesco: Education*.

World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. In *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. World Bank Publications. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Application: Design and Methods. In *Sage Publications, Inc.*